

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya mahasiswa dikenal oleh masyarakat sebagai sosok pemuda yang memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi karena memiliki kesempatan lebih baik dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika mereka memiliki sikap yang kritis dalam menanggapi suatu kejadian serta memiliki sikap yang cerdas dalam melakukan tindakan atau yang lebih dikenal sebagai agen perubahan dan sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Untuk merealisasikan peran mahasiswa tersebut di Universitas Negeri Jakarta tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial berdirilah suatu organisasi pergerakan mahasiswa yang bernama Red Soldier FIS. Red Soldier sendiri merupakan organisasi tim aksi fakultas ilmu sosial yang berada di bawah departemen sosial politik BEM Fakultas Ilmu Sosial. Peran Red Soldier sendiri adalah sebagai pemimpin gerakan mahasiswa fakultas ilmu sosial atas berbagai isu yang meresahkan baik itu permasalahan dalam kampus maupun permasalahan nasional yang melanda Indonesia.

Dalam bergerak kerap kali organisasi ini berkolaborasi dengan organisasi lainnya serta organisasi tim aksi fakultas lain yang sejenis di UNJ maupun tim aksi bentukan BEM UNJ yaitu Green Force UNJ. Red Soldier sendiri berdiri sejak tahun

2008 yang diketuai atau dikomandani oleh mahasiswa PPKN saat itu bernama Tresna dimana pada awalnya organisasi ini bernama Baret Merah. Akan tetapi karena saat itu sedang gencar isu bangkitnya kembali PKI maka pada kepemimpinan Gunardi pada tahun 2009 digantilah nama Baret Merah yang namanya dikhawatirkan berbau komunis menjadi Red Soldier FIS. Organisasi ini dipimpin oleh seorang komandan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengepalai seluruh kegiatan Red Soldier ini. Komandan sendiri dibantu oleh seorang sekretaris jenderal yang bertugas membantu pimpinan atau komandan serta menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas selain itu komandan Red Soldier ini juga dibantu seorang sekretaris dan seorang bendahara yang bertugas mengurus berbagai keperluan kearsipan dan surat serta mengurus perihal keuangan organisasi ini.

Dalam strukturnya juga terdapat berbagai divisi diantaranya divisi internal yang berperan dalam menjaga keutuhan organisasi Red Soldier ini serta membuat berbagai kegiatan hiburan bagi anggotanya. Selanjutnya adalah divisi pusgerak atau pusat gerakan yang berperan dalam mencari isu, membuat kajian mengenai isu tersebut, hingga terakhir mempersiapkan gerakan mahasiswa jika dianggap permasalahan yang dibawa meresahkan. Divisi pusgerak ini merupakan aktor dari lahirnya berbagai gerakan yang dilakukan Red Soldier ini. Diantara gerakan tersebut seperti pada tahun 2017 lalu Red Soldier turut memimpin pergerakan dalam menolak kriminalisasi dosen dan plagiatisme yang terjadi di UNJ ini. Awal dari lahirnya gerakan tersebut adalah dari kajian yang dilakukan oleh divisi pusgerak ini dibantu

oleh divisi lainnya yang memberikan pencerdasan dan keresahan bersama pada mahasiswa UNJ yang dimulai dari fakultas ilmu sosial tempat diadakannya diskusi tersebut.

Divisi yang terakhir dalam organisasi Red Soldier ini yaitu divisi propaganda. Peran divisi propaganda ini adalah sebagai pengelola media dari Red Soldier guna melakukan pencerdasan kepada sesama mahasiswa maupun masyarakat mengenai permasalahan yang sedang dikaji, mengelola media massa, serta menyebarkan berbagai hasil kegiatan dan karya anggota Red Soldier seperti berupa tulisan dan video. Peran divisi propaganda ini sangat vital dalam organisasi Red Soldier ini karena melalui media massa yang dikelolanya dapat menunjukkan eksistensi Red Soldier sebagai salah satu organisasi pergerakan mahasiswa di UNJ. Berbicara mengenai media massa mamiliki pengertian bahwa media merupakan seperangkat alat yang sangat dekat dengan masyarakat dan sangatlah efektif sebagai alat sosialisasi maupun framing. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima, media komunikasi ada yang berbentuk saluran antarpribadi, media kelompok dan juga media massa.¹ Media massa secara teoritis memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai saluran informasi, saluran pendidikan dan saluran hiburan, selain fungsi tersebut media masa juga memberikan efek lainnya diluar fungsinya itu.

¹ Cangara Hafied, "*Komunikasi politik*". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm 16.

Efek media massa tidak hanya mempengaruhi sikap dari seseorang tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku, bahkan pada tataran yang lebih jauh efek media massa dapat mempengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem budaya di masyarakat. Selain itu dalam aspek waktunya media dapat mempengaruhi seseorang dalam waktu yang pendek dan bisa juga dalam waktu yang lama. Hal tersebut terjadi akibat efek media massa terjadi secara disengaja, namun juga ada efek media yang diterima masyarakat tanpa disengaja. Hubungan antara media dan pemerintah biasanya lebih bersifat negatif. Hubungan antara media dengan politisi atau pemerintah sudah berjalan sekian lama, dan hubungan itu boleh dikatakan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, bukan saja karena wartawan membutuhkan pejabat pemerintah atau politisi sebagai sumber informasi, tetapi juga para politisi maupun pejabat pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan pikiran maupun kebijakan yang mereka ambil untuk kepentingan orang banyak. Meski ada hubungan yang saling membutuhkan antara media dengan politisi, namun hubungan ini kadang menimbulkan gesekan yang kurang harmonis. Karena itu ada yang mengatakan hubungan antara keduanya benci tapi rindu.²

Salah satu bentuk hubungan negatif media dan pemerintah yaitu mengenai pemberitaan pejabat pemerintah seperti kepala daerah dan wakil rakyat yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Operasi tangkap tangan yang populer dikenal dengan OTT oleh KPK telah ditempatkan sebagai posisi strategis bagi KPK dalam

² Ibid, Hlm. 103

banyak kasus yang melibatkan pejabat tinggi/penyelenggara negara selama kurun waktu 2015-2017. Awal pertama OTT terjadi pada kasus (alm) Mulyana W Kusumah dan berhasil sampai diputus pengadilan dalam kasus KPU dan berturut-turut pimpinan KPU lainnya. OTT yang sering didahului dengan penyadapan tentu dalam praktik lebih mudah daripada proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan penyidik KPK. Pengertian tertangkap tangan (TT) menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

"Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."³

Banyaknya pemberitaan Operasi Tangkap Tangan KPK yang diberitakan diberbagai media di Indonesia tentunya dapat memicu berbagai dampak bagi jalannya proses demokrasi. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah pada jalannya proses PEMILU serentak yang terjadi pada tahun 2019. Dimana akan terbentuk pola fikir masyarakat terlebih mahasiswa UNJ yang tergabung dalam Red Soldier FIS maupun stigma yang terbangun atas para calon wakil mereka yang dihasilkan dari proses PEMILU atas hasil dari berbagai pemberitaan OTT tersebut. Salah satu bukti begitu pengaruhnya media terhadap aktivitas politik dalam buku komunikasi politik adalah "sampai banyak penduduk Amerika Serikat menunda untuk menentukan

³ Pasal 1 angka 19 KUHAP.

pilihannya, siapa yang akan menjadi presiden lima tahun mendatang sebelum mereka lihat sang kandidat tampil di televisi.”⁴

Adanya pemberitaan di media massa mengenai OTT atau operasi tangkap tangan kepada kepala-kepala daerah maupun para anggota legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah tentulah membuat publik yang diwakili dan memilih mereka dalam proses pemilihan umum yang demokratis menjadi kecewa dan geram akan pemberitaan tersebut. Adanya pemberitaan ini oleh media bisa saja berdampak kepada persepsi dan pemaknaan publik atas PEMILU menjadi buruk karena menghasilkan wakil rakyat yang korupsi. Contoh pemberitaan OTT dalah seperti pemberitaan yang dikutip dari pemberitaan Kompas.com tentang Bagaimana Nasib Anggota DPRD Kota Malang yang Tersisa “Dalam kasus ini, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Angka itu bertambah sesuai KPK mengembangkan perkara ini dan menetapkan 22 anggota DPRD lainnya sebagai tersangka pada Senin 3 September 2018⁵. dan menurut pemberitaan Kompas.com KPK Amankan 12 Orang saat OTT Anggota DPR Kristian bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018 sore.⁶

⁴ Cangara, Hafied. Op,Cit, Hlm 96.

⁵ Bagaimana Nasib DPRD Kota Malang yang Tersisa, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/07060481/bagaimana-nasib-anggota-dprd-kota-malang-yang-tersisa.pada> 04 Oktober 2018 Pukul 19.00 WIB.

⁶ KPK Amankan 12 Orang Saat OTT Anggota DPR, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/14/14242481/kpk-amankan-12-orang-saat-ott-anggota-dpr>. Pada 04 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB.

Denis McQuail menjelaskan bahwa efek media massa memiliki *typology* yang mana terdiri dari empat bagian yang besar. Pertama efek media yang direncanakan sebagai sebuah efek yang diharapkan terjadi baik oleh media massa sendiri ataupun orang yang menggunakan media massa untuk kepentingan berbagai penyebaran informasi. Kedua efek media massa yang tidak dapat diperkirakan, sebagai efek yang benar-benar diluar kontrol media, diluar kemampuan media ataupun orang lain yang menggunakan media untuk penyebaran informasi melalui media untuk mengontrol terjadinya efek media massa. Ketiga efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, dan keras mempengaruhi seseorang atau masyarakat. Keempat efek media massa berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga mempengaruhi sikap-sikap adopsi inovasi, kontrol sosial sampai dengan perubahan kelembagaan, dan persoalan-persoalan perubahan budaya.⁷

Efikasi juga penting untuk menjelaskan dengan jelas efek paparan media,⁸ dan ini seharusnya menjadi kasus untuk media ekstrim juga. Efikasi internal adalah perasaan bahwa seseorang dapat memahami dunia politik atau bahwa informan dapat memiliki efek pada politik⁹, sedangkan efikasi eksternal adalah arti ada tingkat respon sistemik atau kesadaran dari para pemimpin politik.¹⁰ Media ekstrim umumnya mengurangi kepercayaan pada pemerintah, tetapi meningkatkan efisiensi internal.

⁷ Burhan Bungin, "*Sosiologi Komunikasi*", (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 321.

⁸ J.B.Taylor, "*Eksploring the Effect of Extreme Media on Political Trust and Efficacy*", Jurnal Extreme Media and American Politics, 2017, Hlm 99.

⁹ Ibid, Hlm. 98

¹⁰ Ibid, Hlm, 97.

Dalam sebuah pengaturan eksperimental, hasilnya menunjukkan bagaimana dimensi politik yang berbeda kepercayaan dan pengaruh dipengaruhi oleh cara media televisi yang ekstrim mencakup masalah kebijakan. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun banyak sekali faktor-faktor yang kita ketahui yang menjelaskan kepercayaan politik dan efisiensi, televisi ekstrim media sangat berpengaruh pada sikap-sikap yang dipegang teguh ini. Temuan dalam literatur yang lebih besar tentang efek media dan kepercayaan politik dan *efficacy*, dan menunjukkan bahwa media ekstrim dapat menghasilkan yang tepat kondisi sikap untuk Hipotesis Gamson untuk aksi politik. Pada intinya, warga memiliki "kepercayaan politik" ketika mereka merasakan tindakan dan niat pemerintah atau politisi adalah sah atau di dalam warga negara minat. Penelitian menunjukkan hal itu kedua konsepsi kepercayaan politik berlaku dalam situasi yang berbeda¹¹, misalnya, menunjukkan bahwa kepercayaan politik dipengaruhi oleh kedua institusi dan aktor politik secara bersamaan, yang berarti mengisolasi sebab-sebab politik kepercayaan sangat kompleks dan sulit.

Media ekstrim adalah ujian yang bagus untuk kepercayaan politik karena caranya mereka mencakup masalah dan kebijakan. Media ekstrim akan menyoroiti efek negatif dari kebijakan yang tidak mereka setuju. Kepercayaan pada pemerintah juga bisa menjadi prediktor yang signifikan dalam memilih untuk kandidat pihak ketiga, dan prediktor penting dalam pilihan suara ketika kandidat konsisten

¹¹ Ibid, Hlm. 94.

menggunakan anti-pemerintah bahasa dan pesan.¹² Pengaruh media di Indonesia sangatlah berpengaruh terhadap iklim demokratis dan tidak bisa ditolak kehadirannya karena masyarakat yang menentukan pemimpin bagi daerahnya maupun negaranya dapat dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Media massa di Indonesia saat ini telah sangat berkembang pesat dibandingkan pada saat era Orde Baru dimana media hanya dimiliki oleh pemerintah saja. Saat ini media di Indonesia sudah sangatlah banyak baik milik negara maupun milik swasta. Diantara banyaknya masyarakat tersebut salah satu pengaruh media massa berdampak pada mahasiswa sebagai golongan pemilih muda.

Universitas Negeri Jakarta sendiri memiliki banyak mahasiswa. Diantara para pemilih muda lainnya golongan mahasiswa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi tentulah memiliki pengetahuan dan nalar kritis yang lebih besar serta sebagai pemuda memiliki tingkat resistensi yang tinggi, tentulah adanya pemberitaan di media massa akan berpengaruh pada pandangan mahasiswa mengenai seberapa berdampak hasil dari proses politik yaitu PEMILU kepada mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Red Soldier yang sangat aktif dalam membahas dan berdiskusi mengenai berbagai permasalahan baik tingkat kampus maupun permasalahan nasional. Sehingga hal tersebut dapat mengkontruksi tanggapan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Red Soldier ini terhadap PEMILU

¹² Ibid, Hlm. 96.

akibat dari berbagai pemberitaan di media massa mengenai wakil rakyat yang terjaring OTT KPK.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat judul skripsi tentang “PEMBERITAAN OTT KPK DAN KEPUTUSAN POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILU 2019 (Studi Kasus Pada Aktivis Organisasi Mahasiswa Red Soldier Fakultas Ilmu Sosial)”

I.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan pada penelitian ini, keberadaan media massa di Indonesia dalam kontestasi politik sangatlah mewarnai jalannya proses demokrasi berupa pemilihan umum atau PEMILU. Berbagai pemberitaan dan framing yang dihadirkan dapat mempengaruhi aktivis Red Soldier sebagai pemilih dalam PEMILU. Pada saat ini salah satu kelompok umur yang berjumlah besar pada pemilih merupakan generasi muda yang diambil dari data BPS DKI Jakarta dimana diambil dari jumlah penduduk DKI berdasarkan umur pada tahun 2015 yang pada tahun 2019 ini masih termasuk pemilih usia muda ataupun baru memilih umur 10 ^{1/2} sampai 24 tahun berjumlah 2.321.076 orang¹³. Generasi muda saat ini sendiripun merupakan generasi milineal yang sangat mudah mengakses informasi dari berbagai media dan juga banyak dari

¹³ Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta. diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/142/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html> pada 3 September 2018 pukul 19.15 WIB.

mereka yang memiliki pendidikan tinggi seperti para aktivis Red Soldier sebagai Mahasiswa UNJ.

Perkembangan pada paradigma aktivis Red Soldier sendiri dalam memandang PEMILU sangatlah dipengaruhi oleh pemberitaan media massa, framing dari media massa, maupun proses demokrasi yang berjalan. Melihat saat ini berbagai media massa terutama televisi yang sangatlah mudah diakses oleh para mahasiswa banyak dimiliki oleh kader dari berbagai partai politik. Seringkali pemberitaan yang ada tidaklah berimbang dan menguntungkan dari salah satu pihak saja. Disinilah nalar aktivis sebagai warga negara yang memiliki pendidikan lebih tinggi diuji dalam melihat suatu bentuk framing yang dibuat oleh media massa.

Melihat PEMILU Presiden pada tahun 2014 dan PEMILU Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu berlangsung sangatlah panas. Panasnya suhu politik tersebut salah satu sebabnya adalah peran media yang bersebrangan dalam memberitakan dan memframing para calon tersebut baik calon Presiden pada tahun 2014 dimana terjadi kontestasi antara Metro TV dan TV One dalam memframing Jokowi dan Prabowo sebagai calon presiden. Hal tersebut terulang kembali pada PILGUB DKI Jakarta 2017 dimana panasnya situasi politik saat itu dibumbui oleh pemberitaan media massa mengenai kasus penistaan agama oleh Basuki Purnama sebagai calon Gubernur oleh berbagai media massa seperti I-News dan pada media Metro TV memberitakan framing yang baik mengenai keberhasilannya selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Adanya pemberitaan dan framing media massa tersebut berdampak pada pemaknaan para pemilih dalam memandang proses demokrasi di Indonesia.

Adapula pemberitaan buruk yang diberitakan media massa seperti pemberitaan OTT oleh KPK terhadap para wakil rakyat baik yang akan menjabat maupun sudah menjabat. Sehingga salah satunya dapatlah menghasilkan tanggapan yang beragam dan tindakan dari yang tergabung dalam organisasi Red Soldier sebagai pemilih muda yang berpendidikan terhadap PEMILU 2019 ini sebagai suatu bentuk proses demokrasi.

Untuk itu, menarik bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam bagaimana perilaku politik yang timbul atas pemberitaan OTT bagi aktivis mahasiswa anggota Red Soldier dalam PEMILU sebagai proses demokrasi bagi para mahasiswa sebagai pemilih muda yang berpendidikan tinggi. Berdasarkan identifikasi permasalahan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi pemberitaan OTT KPK pada keputusan politik aktivis Red Soldier ?
2. Bagaimana analisis perilaku politik bagi aktivis Red Soldier dalam pemberitaan operasi tangkap tangan KPK di media massa ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan permasalahan penelitian diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi pemberitaan OTT KPK pada keputusan politik aktivis Red Soldier.

2. Untuk mengetahui analisis perilaku politik bagi aktivis Red Soldier dalam pemberitaan operasi tangkap tangan KPK di media massa.

I.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini bermaksud untuk memperkaya pengetahuan tentang dampak pemberitaan Operasi Tangkap Tangan KPK bagi anggota Red Soldier sebagai organisasi mahasiswa yang juga merupakan pemilih muda dalam PEMILU 2019 dari sudut pandang sosiologis dan politik. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk peneliti, mahasiswa dan masyarakat.

Manfaat-manfaat itu yaitu :

1. Bagi Peneliti, mampu mendeskripsikan seperti apa tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai pemilih muda terkhusus anggota Red Soldier yang melihat pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan KPK.
2. Bagi Mahasiswa, bisa menjadi suatu evaluasi agar menjadi pemilih yang cerdas. Selain itu dapat juga memberi rujukan pengetahuan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
3. Bagi Masyarakat, dapat menjadi pengetahuan dan renungan bagaimana mengaplikasikan demokrasi yang baik sehingga tidak banyak lagi pemberitaan korupsi yang beredar di berbagai media.

I.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Proses penelitian ini dibantu oleh beberapa penelitian sejenis yang objek serta subjek kajiannya ialah Dampak Pemberitaan, Komunikasi Politik, Sosiologi Komunikasi, Sosiologi Korupsi, dan lainnya . Tinjauan penelitian sejenis ini bertujuan agar menginformasikan kepada pembaca hasil dari penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada serta mengisi celah dalam penelitian sebelumnya.¹⁴ Penelitian sejenis tersebut dapat menjadi dasar untuk peneliti agar dapat melakukan proses penelitian ke tahap selanjutnya. Berikut adalah penelitian sejenis yang kemudian peneliti ambil guna membantu proses penelitian :

Pertama, jurnal dari Artidjo Alkostar yang berjudul Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)¹⁵. Fokus penelitian ini ialah kebijakan penanggulangan korupsi politik, korelasi korupsi politik dengan dimensi sosio-kultural dan sosio-ekonomi, terutama pengaruhnya terhadap tingkah laku elit birokrasi dalam menekan law enforcement (penegakan hukum) dan terhadap kondisi ekonomi. bagaimana korelasi korupsi politik dengan dimensi sosio-yuridis, terutama pengaruhnya terhadap politik, korelasi korupsi politik dan paradigma hukumnya di

¹⁴ John W. Creswell, *Research Design 'Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.*, Terj Achmad Fawaid (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010) Hlm.40.

¹⁵ Artidjo Alkosar, “Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)”. Jurnal Hukum. Vol. 16 .No. Edisi, 2009. Hlm 175.

Indonesia, di beberapa negara modern, dan di era globalisasi, korelasi korupsi politik dengan berbagai dimensi sosiopolitik terutama dengan timbulnya revolusi sosial dan krisis politik (chaos) dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu pemerintahan. Artinya, peneliti memfokuskan penelitian pada korelasi korupsi politik dengan HAM, Soio-kultural, dan upaya penanggulangannya.

Selanjutnya hasil dari penelitian Artidjo Alkostar ialah bahwa Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di berbagai aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Korupsi politik mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi didalam negara demokrasi. Korupsi politik dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku korupsi politik berdampak pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat.

Keterlibatan peran negara atau pemerintah dalam tata hubungan perekonomian secara intensif seperti yang terjadi di negara komunis dan negara otoriter lainnya banyak menimbulkan korupsi secara sistemik. Salah satu bentuk campur tangan negara dalam dunia ekonomi oleh negara adalah monopoli usaha oleh

negara. Dalam kondisi seperti ini bisa muncul berbagai corak kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni, yang menempel bersembunyi dan berlindung dibalik kekuasaan monopoli negara itu. Akibatnya lalu terjadi keadaan dimana tidak bisa dipisahkan antara kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni dengan kepentingan negara. Dari hal itu timbullah suatu sistem yang eksploitatif dimana kepentingan pribadi dan kelompok menjadi benalu bagi kekayaan milik negara. Dalam arti negara dirugikan secara sistematis akibat adanya kekuasaan politik yang curang dan mengeksploitasi harta kekayaan negara. Sejak dulu dalam sejarah evolusi dan revolusi kehidupan masyarakat manusia, kekuasaan selalu cenderung diperluas dan diperbesar oleh pemegangnya. Ketidakseimbangan antara proses membesarkan kekuasaan pemegangnya dan membesarnya kontrol, senantiasa menimbulkan korupsi kekuasaan.

Jadi intervensi politik yang mengarahkan pemenang kontrak agar jatuh ke kroninya merupakan bagian dari proses korupsi politik. Kontrak yang menyangkut kepentingan publik, menuntut adanya akuntabilitas publik dalam proses penentuan pemenang, sehingga perlu adanya transparansi, kejelasan kriteria. Jika terjadi selingkuh kepentingan yang tercakup dalam pengertian korupsi politik, maka perlu adanya pengontrolnya. Korupsi politik menjadi sulit terjadi, menurut David Osborne, jika memenuhi 4 kriteria, yaitu penawarannya betul-betul kompetitif, kompetisinya berdasarkan informasi yang jelas dalam hal yang menyangkut warga dan kualitas kinerja; para kontraktor diperiksa secara teliti, dan diupayakan yang menentukan

pemenangnya adalah institusi yang non politik. Jadi dalam hal ini Osborne menekankan bahwa untuk meminimalkan terjadinya korupsi menuntut adanya budaya transparansi dan sikap persamaan perlakuan.

Dengan mempergunakan kacamata teori sistem hukum dalam melihat fenomena korupsi di Indonesia sampai tahun 2005, Muladi berpendapat bahwa persoalannya cenderung berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) dan kualitas moral sumber daya manusianya, berpa pandangan, sikap, persepsi, perilaku, bahkan falsafah dari para anggota masyarakat yang kontraproduktif. Korupsi politik berkorelasi dengan penegakan HAM, karena makin korup suatu rezim pemerintahan akan makin represif karakter pemerintahannya yang pada saat yang sama penguasa akan banyak mengabaikan kaidah hukum dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Timbulnya korupsi dan kejahatan HAM tidak lepas dari kekuasaan yang tidak terkontrol atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini menurut Muladi, mengingat seringkali dikatakan bahwa sumber atau kesempatan korupsi adalah pemberian monopoli kekuasaan kepada seseorang atau lembaga disertai dengan kewenangan untuk melakukan diskresi secara luas (perpajakan, bea cukai, penegakan hukum, imigrasi), maka harus ada pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap kewenangan monopolistik dan diskresioner tersebut.¹⁶

Tinjauan penelitian sejenis yang *kedua* ialah penelitian yang dilakukan oleh Alan S. Gerber, Dean Karlan dan Daniel Bergan yang berjudul *Does the Media*

¹⁶ Artidjo Alkosar Op.Cit, Hlm. 175.

*Matter? A Field Experiment Measuring the Effect of Newspapers on Voting Behavior and Political Opinions*¹⁷. Fokus penelitian ini ialah melihat pengaruh efek paparan surat kabar tentang perilaku dan pendapat politik serta seberapa besarnya pengaruh surat kabar terhadap perilaku dan pendapat politik.

Hasil dari penelitian Alan S. Gerber, Dean Karlan dan Daniel Bergan adalah Dalam percobaan kami, kami tidak menemukan efek menerima surat kabar tentang pengetahuan peristiwa politik, opini dari peristiwa-peristiwa itu, atau tentang partisipasi pemilih di gubernur tahun 2005 kemudian kemiringan pemberitaan media kurang penting dalam hal ini daripada paparan media. Ada juga beberapa bukti peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan 2006 di antara mereka yang menerima paper.

Selanjutnya Investigasi penelitian tentang pengaruh surat kabar tentang sikap, perilaku, dan pengetahuan subjek politik dari acara berita menemukan bahwa bahkan paparan singkat untuk surat kabar harian tampaknya mempengaruhi perilaku memilih dan dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Berlawanan dengan harapan kami, meskipun ada kemiringan surat kabar, efeknya kualitatif serupa untuk Post dan Times. Satu penjelasan untuk temuan kami adalah lingkungan berita tertentu, yang secara politik menantang bagi Partai Republik. Selama periode ketika subyek menerima surat kabar, peringkat persetujuan Bush turun sekitar 40 hingga 37 persen

¹⁷ Alan S. Gerber, Dean Karlan dan Daniel Bergan, “*Does the Media Matter? A Field Experiment Measuring the Effect of Newspapers on Voting Behavior and Political Opinions*”, Vol. 1, No. 2, 2014.

secara nasional. Ada perbedaan yang jelas dalam hal ini kertas miring kanan dan kertas bersandar kiri menutupi berita, tetapi kedua kertas tertutup korban perang dan kontroversi politik seperti investigasi Plame dan secara luas mengkritik pencalonan Mahkamah Agung Miers. Bisa jadi itu yang liputannya memiliki kesamaan lebih penting daripada perbedaan antara surat kabar.

Kemudian penelitian Alan S. Gerber, Dean Karlan dan Daniel Bergan juga menjelaskan surat kabar memiliki efek pada kandidat mana subjek mendukung. Memperoleh Postingan diperkirakan meningkatkan kemungkinan memilih. Demokrat dengan 11,2 poin persentase di antara mereka yang melaporkan voting dan sebesar 7,2 poin persentase di semua responden. Berbeda dengan harapan awal, Times bersandar kanan juga dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan suara Demokrat dalam persainagan gubernur Virginia. Efeknya sekitar $\frac{3}{4}$ sebesar yang diperkirakan untuk perawatan Post 7,4 poin persentase dan p, 0,10, dan 6,0 poin persentase dan 0,084, masing-masing. Perbedaan antara estimasi Titik Pos dan Kali tidak signifikan secara statistik.

Tinjauan penelitian sejenis yang *ketiga* ialah penelitian yang dilakukan oleh Saepul Romdon yang berjudul *Koran Tempo Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Wisma Atlet Palembang*.¹⁸ Fokus penelitian ini ialah melihat proses pengambilan keputusan Koran Tempo dalam mengungkap kasus korupsi Wisma Atlet Palembang

¹⁸ Saepul Romdon, „*Koran Tempo Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Wisma Atlet Palembang*”. (Depok :Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014), Hlm 1.

dan faktor-faktor yang berperan dalam proses pengambilan keputusan Koran Tempo dalam mengungkap kasus korupsi Wisma Atlet Palembang

Hasil penelitian Saepul Romdon ini didapat dengan mengambil diskursus media massa, studi ini bertujuan untuk melihat proses pengambilan keputusan dalam newsroom Koran Tempo pada pemberitaan kasus korupsi wisma atlet Palembang. Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini menemukan berbagai interaksi agen baik yang bersifat allocative resources maupun yang sifatnya authoritative resources, hal tersebut sekaligus memperlihatkan kemampuan agen menciptakan struktur baru dalam praktik sosial pemberitaan. Proses pengambilan keputusan koran tempo dalam mengungkap pemberitaan kasus korupsi wisma atlet Palembang, tergambar dalam alur produksi berita, struktur koran tempo yang terkait dengan aturan dan sumber daya berpadu dengan agen pengelola berita.

Kemudian dalam penelitian Saepul Romdon ini ditemukan bahwa struktur juga memperlihatkan kemampuannya dalam newsroom, dimana keputusan berita tidak mengabaikan aturan-aturan jurnalistik yang telah ditetapkan. Pada prosesnya newsroom tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan ekonomi dan politik. Ruang berita atau *newsroom* dalam hal ini selain menjadi setting ruang dan waktu di mana struktur dalam aturan dan sumber daya berinteraksi dalam agen yang bersifat dualitas, di samping itu *newsroom* juga menjadi tempat atau arena kontestasi kekuasaan dalam menentukan sebuah berita, yang memunculkan agen mayor sebagai pemenangnya jika merujuk *newsroom* hanya terbatas dikelola oleh para redaktornya, maka yang

menjadi mayor agen adalah redaktur tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa agen mayor mengukuhkan kekuasaannya melalui struktur-struktur baru.

Dalam penelitian Saepul Romdon ini proses strukturasi di koran tempo ini dipengaruhi kekuasaan politik dan ekonomi, yang berasal dari wartawan agen minor bertindak *autoritative resources* yang kemudian dikuatkan oleh agen mayor yang memiliki *allocative resources*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dimana dalam sepanjang pemberitaan wisma atlit tidak ada yang merasa dirugikan ataupun dicemarkan nama baiknya. Hal tersebut terjadi karena empat faktor : pertama pemahaman sebagai profesi wartawan, kedua konvergensi media, ketataan kode etik jurnalistik dan kebebasan jurnalistik dalam undang-undang Pers.

Tinjauan penelitian sejenis yang *keempat* ialah penelitian yang dilakukan oleh Dimas Adrianto yang berjudul Media, Ideologi dan Propaganda : Analisis Framing dalam Pemberitaan Korupsi Gayus Tambunan oleh Kompas.com dan Tempointeraktif.com.¹⁹ Fokus penelitian ini ialah melihat Bagaimana kompas.com dan tempointeraktif.com membingkai teks yang dipengaruhi oleh ideologi terkait pemberitaan kasus mafia pajak pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Gayus Tambunan.

Hasil penelitian dari penelitian Dimas Adrianto ini adalah didapat kedua portal web yaitu kompas.com dan tempointeraktif.com menyajikan berita dengan isi

¹⁹ Dimas Adrianto, "*Kor Media, Ideologi dan Propaganda : Analisis Framing dalam Pemberitaan Korupsi Gayus Tambunan oleh Kompas.com dan Tempointeraktif.com*". (Depok : Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia., 2013), Hlm 1.

tidak jauh berbeda dengan bentuk media cetak perusahaan induknya. Kompas.com cenderung menyajikan berita dengan penuturan yang terkesan *safe*, santun dan analisis yang rapi, dan narasumber yang melekat pada figur lembaga negara. Sedangkan Tempointeraktif.com cenderung lugas dan tajam dalam karakter menyajikan berita.²⁰

Keterkaitan pembingkai realitas dengan model propaganda Chomsky, topik berita kedua media tersebut mengenai Gayus Tambunan memenuhi kriteria model propaganda karena hal itu tercakup dengan kebijakan umum industri media yang dipaparkan oleh Chomsky. Media melakukan seleksi topik kepada publik lalu secara konstan mendistribusikan konsentrasi isinya. Penekanan dan *Framing* isu merupakan upaya media memastikan konsumsi realitas teks oleh publik selalu terjaga. Pembatasan, perdebatan, dan penyaringan informasi memastikan teks yang tidak perlu diketahui. Dalam penelitian Dimas Adrianto ini jika dilihat Implikasi Ekonomi Politik dari kebijakan umum media dalam model propaganda di Indonesia yaitu dihilangkannya atau dikurangnya kasus-kasus lain yang lebih besar seperti BLBI, Bank Century, Pelanggaran HAM maupun kebebasan beragama karena hal itu tidak menjadi perhatian utama. Menguatkan pendapat Chomsky peneliti sepakat hanya sedikit publik terdidik yang menyetujui sebuah isu di atas isu lainnya yang sedang dikemas oleh media dan menolak melupakan kasus lama yang belum bahkan tidak tertuntaskan.

²⁰ Ibid, Hlm.104

Peneliti Dimas Adrianto ini menemukan terjadi pendangkalan masalah korupsi. Karena kassnya semakin banyak, media juga melakukan seleksi kasus yang dijadikan headline berdasarkan nilai beritanya, yang tidak selalu ditentukan dari kadar atau bobot kasusnya. Atau malah sebaliknya, sebuah kasus yang terus menerus diliput hingga media massa melampaui fungsinya yang mengontrol kepentingan wacana publik. Media cenderung menyoroti aspek penegakan hukum dan politiknya saja. Aspek pengaruh korupsi terhadap kemiskinan dan dampak ekonomi tidak banyak diungkapkan oleh media. Selain itu media juga mengabaikan sisi preventif dari usaha pemberantasan korupsi yang penting juga selain penegakan hukum. Yang terakhir adalah terjadinya erosi atas integritas dan kredibilitas media terutama dengan adanya korporatisasi di industri media yang memperlihatkan gejala media cenderung mengedepankan kepentingan bisnis dan politik dari pemiliknya.

Penelitian Dimas Adrianto ini membahas konsep *Public Sphere*. Dimana konsep ini dapat juga dilihat di dunia maya. Dari penelitian ini dapat dilihat terjadi perbedaan bentuk pada dunia nyata dan dunia maya. Perbedaan ini tidak selalu bersifat negatif karena masing-masing bentuk ini mempunyai karakteristik dan kekuatan serta kelemahannya masing-masing. Selain itu dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsepsi normatif yang berdasar pada teori komunikasi rasional dari Hebermas ini dapat digunakan sebagai landasan awal bagi penciptaan *Public Sphere* di dunia maya karena konsepsi normatif ini cukup memberikan sebuah

kondisi-kondisi yang jika dapat terpenuhi maka akan tercipta sebuah *public sphere* dunia maya yang ideal.

Tabel 1.1

Perbandingan Telaah Pustaka

No	Peneliti	Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Artidjo Alkostar	2009	Korelasi Politik dan Pemerintahan Negara (Telaah Praktik Politik dan Penanggulangannya) Dengan Hukum Modern tentang Korupsi dan Penanggulangannya	<ul style="list-style-type: none"> • bagaimana korelasi korupsi politik dan paradigma hukumnya di Indonesia, di beberapa negara modern, dan di era globalisasi. • bagaimana korelasi korupsi politik dengan berbagai dimensi sosiopolitik terutama dengan timbulnya revolusi sosial dan krisis politik (chaos) dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu pemerintahan. • bagaimana korelasi korupsi politik dengan dimensi sosio-kultural dan sosio-ekonomi, terutama pengaruhnya terhadap tingkah laku elit birokrasi dalam menekan law enforcement (penegakan hukum) dan terhadap kondisi ekonomi. bagaimana korelasi korupsi politik dengan dimensi sosio-yuridis, terutama pengaruhnya terhadap politik • hukum, politik kriminal, dan perkembangan hukum dalam suatu negara modern • bagaimana upaya 	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Artidjo Alkostar ini lebih terfokus pada hubungan hukum dan korupsi politik. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada persepsi yang timbul pada mahasiswa sebagai pemilih muda terhadap suatu kejadian hukum yaitu pemberitaan OTT KPK kepada para aktor yang melakukan korupsi politik.</p>

No	Peneliti	Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				(kebijakan/strategi) penanggulangan korupsi politik	
2	Alan S. Gerber, Dean Karlan dan Daniel Bergan	2014	<i>Does the Media Matter? A Field Experiment Measuring the Effect of Newspapers on Voting Behavior and Political Opinions</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat dampak paparan media massa salah satunya melalui mengukur hubungan antara a paparan media yang dilaporkan responden dan pandangan politiknya.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan kuantitatif
3	Saepul Romdon	2014	Koran Tempo Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Wisma Atlet Palembang	Persamaan dengan penelitian ini adalah dimana sumber ini membahas proses media hingga menjadi berita dan dapat mempengaruhi khalayak	Hanya berfokus pada proses di <i>newsroom</i>
4	Dimas Adrianto	2013	Media, Ideologi dan Propaganda : Analisis Framing dalam Pemberitaan Korupsi Gayus Tambunan oleh Kompas.com dan Tempointeraktif.com	Dalam penelitian ini sama-sama menilai bahwa media massa memiliki peran yang sentral dalam pembentukan opini publik sehingga informasi yang diberikan dapat mempengaruhi situasi sosial maupun tindakan komunikasi pada publik	Lebih banyak membahas mengenai framing dan masalah dalam kasus Gayus
5	Fauzan Indra Kusumah	2020	PEMBERITAAN OTT KPK DAN KEPUTUSAN POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILU 2019 (Studi Kasus Pada Aktivistis Organisasi Mahasiswa Red Soldier Fakultas Ilmu Sosial)	Peran Peneliti : pada penelitian kali ini, peneliti berfokus kepada analisis sosiologis mengenai perilaku politik yang timbul pada aktivis organisasi Red Soldier yang merupakan mahasiswa UNJ sebagai pemilih muda dalam PEMILU 2019 akibat dari banyaknya pemberitaan operasi tangkap tangan atau OTT KPK.	

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2020

I.6 Kerangka Konseptual

I.6.1 Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan KPK

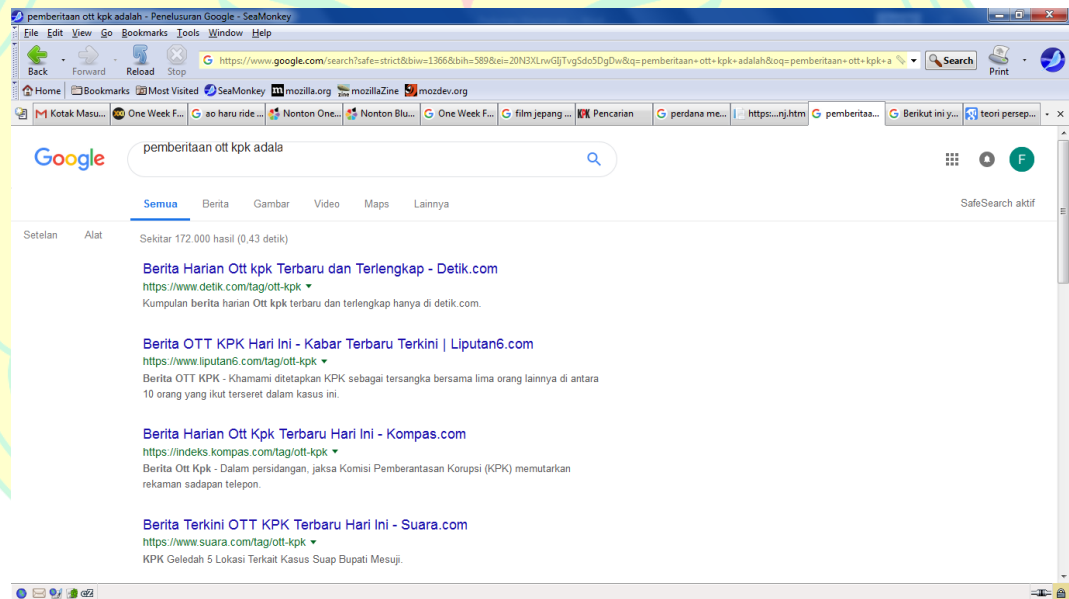
Perkembangan Zaman teknologi yang semakin pesat serta sumber informasi yang begitu cepat berita sangat dibutuhkan dan sangat cepat diperoleh masyarakat. pada masa kini masyarakat sudah tidak lagi mendapatkan kesulitan saat memperoleh berita akantetapi saat ini masyarakat haruslah dapat memilah berbagai pemberitan yang ada, dimana berita yang sesuai fakta yang terjadi dan bukan berupa kebohongan, berita yang menurut masyarakat itu merupakan suatu hal penting dan berita apa yang menarik untuk di simak. Maka sebab itu dibutuhkan media massa yang dapat memberikan laporan berita yang faktual, tajam dan terpercaya.

Pemberitaan sendiri berasal dari kata dasar “berita”, kata “berita” sendiri berasal dari kata sangsekerta, vrit yang memiliki arti ada atau terjadi atau vritta kejadian atau peristiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, Berita adalah “laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Sedangkan operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2017, KPK telah melakukan sebanyak 77 OTT. Selain KPK, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, yang juga melakukan OTT berkaitan dengan pungutan liar.

Dalam penyaluran berita membutuhkan peran dari media massa. Dimana media massa sendiri menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) media massa dapat di artikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi,

film, poster dan spanduk. Media massa merupakan segala bentuk benda yang dapat di manipulasikan, di lihat, di dengar, di baca atau di bicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik untuk suatu proses penyaluran informasi. sehingga dapat dikatakan media massa merupakan perantara dari suatu proses komunikasi seperti ketika seorang menulis surat, maka media yang digunakan adalah kertas atau ketika menelpon menggunakan media telepon.

Gambar 1.1 Pemberitaan OTT KPK Oleh Media Massa



Sumber : Google.com

Media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Budaya, sosial, politik dipengaruhi oleh media. Media massa di katakan sebagai kebudayaan yang bercerita. Media membentuk opini publik untuk membawanya pada perubahan yang signifikan. Pesan media tidak jadi begitu saja, tetapi dibuat dan

diciptakan oleh media massa dengan tujuan tertentu. Menurut Agee dalam Ardianto bahwa media massa yaitu saluran sebagai alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa. Media massa secara pasti memengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Budaya, sosial, politik dipengaruhi oleh media.²¹ Dalam fungsi media massa menurut Burton dalam sosiologi media dari Luh Putu kata fungsi mencakup apa yang harus dilakukan oleh media, apa yang sebenarnya mereka lakukan dan apa yang tampaknya tujuan mereka.²² Fungsi media massa salah satunya yaitu sebagai fungsi informasi dimana mengacu kepada kemanfaatan media untuk memberikan informasi kepada khalayak. McQuail dalam Luh Putu pada bukunya sosiologi media mengemukakan bahwa fungsi informasi dari media mencakup tiga aspek 1. Menyediakan informasi mengenai peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia, 2. Menunjukkan adanya hubungan kekuatan, 3. Memberikan sarana bagi inovasi, adaptasi, dan pertumbuhan.²³

Fungsi selanjutnya adalah agenda setting yang terkait dengan penataan berita agar sesuai dengan kepentingan produsennya. Gagasan ini terlihat pada bagaimana media memberikan bobot terhadap suatu kejadian yang diberitakannya. Fungsi ketiga adalah fungsi korelasi dimana McQuail memberikan penjelasan bahwa fungsi korelasi berkaitan dengan : 1. Menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan komentar atas makna peristiwa dan informasi. 2. Menyediakan dukungan untuk kekuasaan dan norma yang mapan. 3. Sosialisasi. 4. Mengatur aktivitas yang terpisah. 5. Membangun konsensus. 6. Mengatur tatanan prioritas dan melambungkan status relatif.²⁴ Fungsi media keempat adalah sebagai kekuatan keempat dimana media massa berada di tengah, dengan tugas menyeimbangkan hubungan antara masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan *civil society* agar berjalan pada relnya, peran media

²¹ Ardianto Elvinaro, “Komunikasi Massa Suatu Pengantar”, (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2007), Hlm 58.

²² Luh Putu, Sri Aryani dan Nengah Bawa Admaja “Sosiologi Media Perspektif Teori Kritis, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), Hlm. 58.

²³ Ibid. Hlm. 58.

²⁴ Ibid., Hlm. 66.

massa sebagai lembaga kontrol sosial dapat mengakibatkan dia bisa lebih dekat dengan *civil society* guna mengontrol masyarakat ekonomi dan masyarakat politik agar tidak menindas rakyat. Media massa diharapkan bisa menyuarakan aspirasi rakyat atas realitas yang mereka hadapi. Peran media massa adalah menyuarakan kepentingan rakyat pada saat mereka terabaikan oleh penguasa.

Pawito menjelaskan dalam buku sosiologi media perspektif kritis dimana Fungsi media massa kelima adalah fungsi pengembangan demokrasi. Pawito menjelaskan bahwa fungsi yang diperankan oleh media ada enam yakni : 1. Menyediakan ruang bagi forum untuk debat publik, 2. Mengartikulasikan pendapat umum, 3. Memaksa pemerintah mempertimbangkan apa-apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh rakyat, 4. Mendidik warga negara agar memiliki informasi yang memadai bagi pengambilan keputusan dalam pemilihan umum, 5. Memberikan kepada publik saluran-saluran komunikasi politik diantara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, 6. Membela individu-individu melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kalangan eksekutif dan cabang kekuasaan lainnya.²⁵

Media massa tidak hanya sekedar memberikan informasi dan hiburan semata, tetapi juga mengajak khalayak untuk melakukan perubahan perilaku. Melalui beragam konten media yang khas dan unik sehingga pesan-pesan media itu terlihat sangat menarik, menimbulkan rasa penasaran khalayak. Pembingkai pesan melalui teks, gambar dan suara merupakan aktivitas media untuk mempengaruhi pikiran perasaan khalayak. Dalam pemberitaan OTT KPK tentulah berita yang disampaikan oleh media massa dengan pembikainya dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan khalayak yang didalamnya terdapat pemilih-pemilih muda seperti para aktivis Red Soldier. Dimana pemberitaan tersebut menumbuhkan pemikiran para aktivis Red Soldier sebagai pemilih muda tersebut seperti obat yang disuntikan kedalam

²⁵ Ibid, Hlm.75.

pembuluh darah mereka, yang kemudian pendengar tersebut akan bereaksi seperti apa yang diharapkan oleh media yang memberitakan tersebut.

Skema 1.1

Proses Terbentuknya Keputusan Politik



Sumber : Hasil Analisis penulis, 2019

Berdasarkan skema tersebut penulis berpendapat bahwa adanya OTT yang dilakukan oleh KPK terlebih yang menyangkut tokoh politik besar dan memiliki jabatan penting akan diberitakan pada media massa. Kemudian pemberitaan tersebut akan *viral* dan diterima oleh banyak orang seperti para aktivis Red Soldier. Pemberitaan tersebutlah yang menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi keputusan mereka dalam pemilu 2019.

I.6.2 Perilaku Politik

Setelah terbentuknya tanggapan saat mengetahui suatu pemberitaan politik maka memunculkan perilaku politik di dalam tanggapan tersebut. Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai

kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.²⁶ Perilaku politik menurut Sitepu dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni: *pertama*, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, *kedua*, perilaku politik warga negara biasa (baik sebagai individu maupun kelompok).²⁷

Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut.²⁸

Dalam bukunya Ramlan Surbakti, bahwa partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif.²⁹ Partisipasi individual maksudnya, seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, yakni partisipasi kolektif konvensional seperti pemilihan

²⁶ Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*". (Jakarta: Grasindo, 1999) Hlm. 130.

²⁷ Sitepu, P. Anthonius. 2012, "*Teori-teori Politik*". (Yogyakarta: Graha Ilmu) Hlm.88.

²⁸ Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*". (Jakarta: Gramedia, 1992) Hlm.131.

²⁹ Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*", (Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 1999) , Hlm. 143

umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional, seperti pemogokan yang tidak sah, huru-hara dan lain sebagainya.³⁰

Dalam rangka melakukan kajian terhadap perilaku politik lebih lanjut Sitepu menjelaskan bahwa dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis yaitu, individu sebagai aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik.³¹ Adapun yang dimaksud dalam individu aktor politik adalah aktor politik seperti pemimpin atau wakil rakyat, aktivis politik, dan individu warga negara biasa. Yang dimaksud dengan agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa.

Dalam perilaku politik sendiri terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik individu. Berikut ini diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan yaitu psikologi, struktural fungsional dan struktural konflik. Menurut model ini, terdapat tiga faktor yang memengaruhi perilaku politik seorang pelaku politik.³²

1. lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Lingkungan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran politik dan sosialisasi politik.

³⁰ Loc.cit.

³¹ Sitepu, P. Anthonius Op.Cit, Hlm. 89.

³² Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*". (Jakarta: Grasindo, 2010) Hlm. 169.

2. lingkungan sosial politik langsung yang memengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh lingkungan tak langsung. Sigel menjelaskan pembelajaran politik dan sosialisasi politik didefinisikan sebagai "proses dimana orang belajar untuk mengadopsi norma, nilai, sikap, dan perilaku yang diterima dan dipraktikkan oleh sistem yang sedang berlangsung."³³ secara luas mengutip formulasi awal, Greenstein menyatakan bahwa keprihatinan politik sosialisasi adalah dengan "(1) Siapa (2) belajar apa (3) dari siapa (4) di bawah apa keadaan (5) dengan efek apa?"³⁴
3. struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

Untuk memahami struktur kepribadian terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Gabriel Almond dan Sidney Verba berpendapat bahwa orientasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih politiknya dikategorikan menjadi tiga yaitu : pertama, orientasi kognitif yaitu pengetahuan dan kepercayaan pada kandidat, kedua,

³³ Samuel L. Long, *"The Handbook OF Political Behavior"*. (New York : Plenum Press, 1981) Hlm. 279.

³⁴ Greenstein, F. *"Anak-anak dan politik"*. (New Haven: Yale University Press, 1965). Hlm 12.

orientasi politik afektif yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan ketiga, orientasi politik evaluatif yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya.³⁵ Pemilih pemula sendiri memiliki orientasi politik yang selalu dinamis, dimana mereka mudah terpengaruh dan mengikuti lingkungan yang mempengaruhinya.

Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Artinya, penilaian terhadap suatu objek tersebut. Stephen Franzoi berpendapat bahwa apabila caleg mempunyai kredibilitas, terpercaya, dan berkompetensi maka pesan yang disampaikan pemilih dapat lebih diperhatikan, akan tetapi apabila caleg tidak mempunyai unsur-unsur tersebut, maka dapat menimbulkan sikap negatif pada pemilih.³⁶ Potensi yang dimiliki sumber tersebut juga akan mempengaruhi pesan. Adanya pesan yang disampaikan dari pihak lain dapat mencapai tujuan atau mengalami kegagalan tergantung dari potensi yang dimiliki oleh sumber.³⁷ Oleh karena itu, latar belakang menjadi hal yang penting diperhatikan dalam memilih caleg yang kelak akan duduk menjadi anggota dewan berikutnya.

Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin

³⁵ Gabriel Almond dan Sydney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik, dan Demokrasi di Lima Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). Hlm. 16.

³⁶ Stephen Franzoi, *Psikologi Sosial*, Terj Rahmad, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), .

³⁷ Diana, Adam Idris, dan Achmad Djumlani, "Sikap Pemilih Pemula terhadap Calon Legislatif Partai Politik Ditinjau dari Karakteristik Sosial (Studi Kasus Tingkat SMA di Samarinda)", *eJournal Administrative Reform*, 2014, Vol. 2, No. 2, hlm. 1261.

berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan *aggressor* atau pihak yang menyerang.

Ketiga basis tersebut berhubungan dengan proses berfikir. Pada akhirnya reaksi yang ditimbulkan bisa berupa tanggapan positif, negatif, maupun netral yang selanjutnya mempengaruhi perilaku dari aktor. Apabila tanggapan atau reaksi yang dihasilkan berupa penghargaan atau tanggapan positif kepada aktor tersebut dapat menghasilkan kemungkinan yang besar akan adanya perilaku yang sama dilakukan oleh aktor tersebut di masa depan pada situasi serupa. Sebaliknya jika tanggapan tersebut menyakitkan seperti menghukum maka kecil kemungkinan perilaku tersebut diulangi di masa depan.

Salah satu tokoh dari teori perilaku politik ini adalah David E. Apter, dimana dirinya berusaha menjelaskan tentang perilaku yang menekankan pada proses belajar masyarakat dengan variabel berikut ini :³⁸

1. Situasi stimulan dimana stimulan menimbulkan adanya tindakan dalam lingkungan. (Seperti para caleg yang menggabungkan diri dengan partai politik).
2. Kedua adalah adanya dorongan yang timbul yang menyebabkan adanya upaya untuk memperoleh tanggapan yang memuaskan. Contohnya seperti kader partai politik yang memberikan kesetiiaannya terhadap partainya hingga

³⁸ Nasiwan, "*Teori-teori Politik*", (Yogyakarta: Ombak, 2012). Hlm. 37.

dapat memperoleh kekuasaan dan jabatan di masyarakat sehingga mengundang tanggapan memuaskan seperti penghargaan dari orang yang dipimpinya.

3. Terakhir adalah variabel individu seperti keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis yang dapat berpengaruh pada penentuan bagaimana seseorang memahami suatu kesempatan yang ada. Hal ini dapat dicontohkan seperti dukungan pada saat PEMILU, bergabung dengan partai politik, dan pergerakan yang dilakukan.

David Apter disini berusaha menjelaskan bahwa teori ini dapat menjelaskan bagaimana menciptakan, mengubah, menyesuaikan, dan mempelajari tingkah laku tindakan politik seseorang. Untuk itulah dipilihnya teori ini penulis rasakan dapat membantu dalam proses analisis bagaimana perilaku politik pemberitaan OTT KPK pada aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Red Soldier. Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang memengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

I.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting dalam penelitian terhadap suatu fenomena tertentu. Penggunaan metode penelitian yang jelas dan tepat, tentu akan memudahkan peneliti untuk memahami obyek yang akan diteliti. Hal tersebut

dilakukan agar data yang didapat benar-benar akurat serta dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri adalah strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti. mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data defkriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori. Penelitian kualitatif bersifat subyektif dan instrumen sebagai alat pengumpul data ialah peneliti sendiri, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas.³⁹

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupannya, kasus atau berbagai kasus, malalui pengumpulan data yang mendetail dan mendalam dan melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan, dan melaporkan deskripsi kasis dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi multi-situs) atau kasus tunggal (studi dalam-situs).⁴⁰

³⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 2001), Hlm.198

⁴⁰ John W.Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Terj Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), Hlm.135

Metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Studi kasus juga dibedakan menjadi tiga hal tujuan yaitu studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif atau majemuk, dan studi kasus intrinsik

I.7.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan kunci yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta dan subjek penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai sumber data adalah Anggota Red Soldier FIS yang termasuk dalam daftar pemilih dalam PEMILU 2019. Peneliti mewawancarai enam informan secara mendalam.

I.7.2. Peran Peneliti

Peran dari peneliti sendiri dalam penelitian ini berperan sebagai pengamat, perencana, pelaksana, pengumpul data, dan penganalisis data dari subjek penelitian. Peranan peneliti dalam proses penelitian ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait yaitu para aktivis Red Soldier, sehingga peneliti sendiri tidak akan ada kesulitan dalam pengambilan data.

I.7.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat penelitian yang dipilih adalah di kampus Universitas Negeri Jakarta di Jakarta Timur. Waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2019. Proses pengambilan data berupa wawancara dilakukan pada saat istirahat waktu perkuliahan sedang berlangsung. Peneliti memilih lokasi dan waktu tersebut karena mempertimbangkan waktu luang dan tempat berkumpul mahasiswa. Selain itu dipilihnya saat tidak lama dari saat waktu pelaksanaan PEMILU adalah karena ingin menilai perilaku politik dari aktivis Red Soldier yang merupakan para pemilih muda menanggapi banyaknya pemberitaan kasus OTT KPK. Hal tersebut tentunya memudahkan peneliti kaitannya dalam proses penggalian data subyek dan pengamatan.

I.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang sangat strategis dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan tujuan utama dari penelitian merupakan memperoleh data. Peneliti memakai empat teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan memakai panca indera sebagai alat bantu utamanya. Peneliti bisa mengamati subjek pada waktu melakukan tindakan pada saat setelah memperoleh pemberitaan OTT oleh KPK terhadap para pejabat daerah maupun wakil rakyat.

2. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua individu, dengan cara mengajukan pertanyaan yang didasarkan pada tujuan tertentu. Wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur, Hal tersebut membuat peneliti menjadi lebih bebas untuk menggali secara mendalam jawaban yang dilontarkan oleh narasumber.
3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan ialah mengumpulkan beberapa rekaman suara, foto pribadi, *screenshot*, vidio, maupun arsip sebagai alat dokumentasi. Penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku, tesis, jurnal dan dokumentasi yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, penulis mendapatkan buku-buku referensi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan UNJ, dan Perpustakaan UI. Untuk tesis dan jurnal yang menjadi tinjauan penelitian sejenis dalam mengerjakan penulisan ini berasal dari perpustakaan UNJ dan website jurnal resmi.
4. Kerangka berpikir di dalam penelitian merupakan sebuah instrumen yang kemudian mengarahkan kemana arah jalannya dari penelitian tersebut. Kerangka berpikir ini kemudian disusun atas abstraksi yang telah ditemukan peneliti di awal dengan membaca beberapa literatur yang ada mengenai penelitian sejenis tentang sosiologi, korupsi, dan pemberitaan media. Setelah melakukan tinjauan terhadap bacaan yang ditentukan, pembaca kemudian merangkai berbagai inti dari setiap bacaan untuk menggambarkan kerangka pemikiran agar dapat membuat langkah penelitian selanjutnya lebih mudah

untuk dilakukan, dan membuat penelitian lebih sistematis, dan terarah.

Berikut kerangka berpikir yang dibuat oleh penulis :



Berdasarkan skema yang dibuat oleh penulis tersebut dapatlah diketahui kerangka pemikiran penelitian ini. Dimana keputusan politik dari aktivis Red Soldier pada pemilu 2019 salah satunya didapat dari informasi yang mereka terima dari berbagai media masa maupun media sosial. Salah satu pemberitaan tersebut adalah mengenai OTT oleh KPK yang menangkap para anggota legislatif. Pemberitaan tersebut menimbulkan tanggapan yang beragam dari para aktivis organisasi Red Soldier tersebut dan pada akhirnya mereka menentukan perilaku politik mereka dengan membuat keputusan dalam pemilu 2019.

I.7.5 Analisis Data

Pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif, kegiatan analisis data dilakukan sejak awal penelitian serta saat proses dilaksanakannya penelitian tersebut. Data yang didapat selanjutnya dikumpulkan kemudian diolah dengan cara sistematis. Diawali dengan wawancara, observasi, proses editing, mengkralifikasi, mereduksi, hingga sampai pada tahap penyajian dan penyimpulan data. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.⁴¹ Teknik analisis interaktif sendiri merupakan teknik analisis dimana di dalam penelitian kualitatif dapat dikerjakan analisis data pada saat peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan barulah melakukan proses analisis.

Model analisis interaktif menurut miles dan huberman yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis. Dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan saat melakukan analisis data dapat digambarkan dengan empat tahapan, yaitu:

⁴¹ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, Jakarta: UI Press, 1992, Hlm. 15-21.

1. Pengumpulan Data

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialaminya). Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai apa penemuan yang dijumpai. Selain itu merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Selanjutnya sesudah data terkumpul dibuat reduksi data, untuk menentukan data yang relevan dan mempunyai makna, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya melakukan penyederhanaan serta menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang direduksi. Sedangkan untuk data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian dibuang. Atau dengan kata lain reduksi data dipakai untuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting dan mengorganisasikan data. Dengan begitu maka akan mempermudah peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, supaya peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi secara baik dan menyeluruh dan juga bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Maka dari itulah peneliti harus membuat naratif, grafik atau matrik untuk mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut. Dengan cara seperti itu maka peneliti bisa tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang bisa membosankan. Hal seperti ini dilakukan karena data yang tersusun kurang baik dapat mempengaruhi peneliti dalam mengambil kesimpulan yang memihak dan dalam bertindak secara ceroboh, dan tidak mendasar. Mengenai display data harus disadari sebagai bagian di dalam analisis data.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat diperoleh kesimpulan akhir. Mulai dari awal penelitian, peneliti selalu ingin berusaha menemukan makna data yang terkumpul. Oleh sebab itu perlu untuk menemukan tema, pola, persamaan, hubungan, hipotesis, hal-hal yang sering muncul dan lain-lain. Awalnya kesimpulan yang diperoleh bersifat kabur, tentatif dan diragukan namun dengan bertambahnya data baik itu dari hasil observasi maupun wawancara dan dari diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Maka kesimpulan-kesimpulan tersebut harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama berlangsungnya penelitian.

Selanjutnya data-data yang ada disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan bisa ditafsirkan tanpa adanya informasi tambahan. Data tentang informasi yang dirasa sama disatukan dalam satu kategori, sehingga memberikan kemungkinan munculnya kategori baru dari kategori yang telah ada.

I.7.6 Triangulasi Data

Triangulasi pada dasarnya adalah pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya merupakan bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada penelitian kali ini, Triangulasi Data sangat penting digunakan. Triangulasi data sendiri merupakan ide bahwa melihat suatu hal dari beberapa sudut pandang bisa meningkatkan keakuratan.⁴² Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Triangulasi data ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode yang dilakukan dalam melakukan Triangulasi Data ini ialah Wawancara kepada para ahli yang kemudian berkompeten membahas mengenai penelitian ini. ahli tersebut ialah pegawai KPK yaitu Bapak Ramdoni, pakar jurnalistik yaitu Ade

⁴² Neuman W. Lawrence, "Metode Penelitian Sosial", (Jakarta : PT Indeks Permata Puri Media, 2016), Hlm.186.

Armando dan Ronaldo Dwi Prasetyo yang merupakan mahasiswa UNJ yang bukan merupakan pengurus Red Soldier saat penelitian ini dibuat.

I.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dibuat agar penelitian yang kemudian dilakukan berjalan sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan. Selain itu, sistematika penulisan juga bertujuan agar para pembaca dari penelitian ini mengerti akan alur serta arah dari penelitian ini. Agar para pembaca tidak bingung ketika membaca penelitian. Penelitian kali ini disusun atas tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Ketiga bagian ini kemudian diturunkan menjadi lima bab. Dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan satu sama lain. Pada *Bab I* akan dijabarkan mengenai latar belakang penelitian yang dilakukan saat ini. Selanjutnya membahas permasalahan penelitian yang menjadi fokus dari permasalahan penelitian kali ini. Selanjutnya ialah pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti yang berharap terjawab dengan adanya penelitian kali ini. Kemudian pada sub bab selanjutnya membahas manfaat penelitian, kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti, hingga metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti.

Pada *Bab II* akan membahas terkait Profil Red Soldier FIS, kemudian akan membahas juga mengenai kegiatan organisasi tersebut. Setelah itu akan dibahas juga mengenai operasi tangkap tangan mulai dari tujuan dan latar belakangnya sampai pada akhirnya membahas pula sejarah operasi tangkap tangan. Pada bab ini juga

dibahas mengenai pemberitaan operasi tangkap tangan pada Januari sampai dengan Maret 2019.

Kemudian *Bab III* akan membahas terkait pemberitaan Operasi Tangkap Tangan KPK dan dampaknya. Pada Bab ini akan berisi tanggapan dari ketujuh aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Red Soldier, selanjutnya tindakan atas pemberitaan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Serta yang terakhir adalah dampak dari pemberitaan OTT tersebut.

Pada *Bab IV* akan membahas terkait analisis terhadap tanggapan dan perilaku politik aktivis Red Soldier yang terbentuk atas pemberitaan Operasi Tangkap Tangan KPK yang telah disampaikan pada Bab III. Analisis ini berisi analisis dari hasil pengolahan data pembahasan mengenai dampak dari pemberitaan operasi tangkap tangan KPK yang menyebabkan tumbuhnya tanggapan terhadap para aktivis mahasiswa Red Soldier. Hasil pemberitaan tersebut berujung pada perilaku yang akan dilakukan oleh pemilih yang merupakan aktivis mahasiswa tersebut.

Kemudian pada *Bab V* merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Didalamnya terdapat kesimpulan yang kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian ini.